

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM,
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016-2019**

**Wahyu Bima Sakti ¹⁾
Suharno ²⁾**

Bambang Widarno ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

email : ¹⁾ bimasakti140498@gmail.com

ABSTRACT

Capital expenditures are budget expenditures for the acquisition of fixed assets and other assets that provide benefits for more than one accounting period. This study aims to analyze whether Economic Growth (PE), General Allocation Funds (DAU), and Special Allocation Funds (DAK) have a positive effect on capital expenditure in districts / cities in Central Java. This study uses secondary data in the form of PE data, DAK, DAU data from the Central Java Province Central Bureau of Statistics, and data from the ministry of finance. The sample used in this study were 35 districts and cities in Central Java, sourced from the Regional Budget Realization Report (APBD) from 2016-2019. The data collection method used in this research is purposive sampling method. The analytical tool used is multiple linear regression with t test, f test, and coefficient of determination test.

The results of this study indicate that economic growth (PE) has a positive and insignificant effect on capital expenditure, while the General Allocation Fund (DAU) has a significant effect on capital expenditure and the Special Allocation Fund (DAK) has a significant negative effect on capital expenditure.

Keywords: Economic Growth, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah ini juga diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya.

Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerinthan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerinthanya. Peningkatan tanggungjawab di sini adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program- proram yang dijalankannya. Karena memang peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik (Halim, 2012:2).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan inveatasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman sehingga produktivitas semakin meningkat (Dwirandra :2014).

Menurut Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengungkapkan pertumbuhan anggaran belanja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang justru melambat di angka 5,02%. Menurut dia, hal ini mencerminkan jika naiknya anggaran belanja tidak dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain terdapat penurunan realisasi belanja modal selama dua tahun berturut-turut. Komposisi belanja modal terus menyusut hingga 12,07% dari total belanja pemerintah pusat di 2019.(Detik finance 2020) dan Menurut data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai 2019 jumlah belanja modal Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah belanja modal provinsi JawaTengah sebesar Rp. 417.733.407.047. Pada tahun 2018 jumlah belanja modal menurun sebesar Rp. 384.098.366.592. Lalu pada tahun 2019 jumlah belanja modal menurun sebesar Rp. 374.101.474.092.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan dalam penelitian mereka melalui berbagai faktor tersebut memiliki pengaruh positif maupun negatif atau tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Diantaranya penelitian yang dilakukan Siti Mundiroh (2019) menyatakan pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal sedangkan penelitian yang dilakukan Yenni Guspita, Dwi Fitri Puspa, Resti Yulistia Muslim (2009) menyatakan pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Muhammad Syukri Hinaya (2019) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal sedangkan penelitian yang dilakukan Sri Mulyati1(2019) menyatakan dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat menerangkan terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal. Adapun tujuan dari penelitian yang di laksanakan yaitu: (1) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. (2) menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU)

terhadap belanja modal. (3) menganalisis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Anggaran

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Teori ini menjelaskan bahwa penganggaran digunakan untuk merancang rencana kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan yang berupa pengeluaran operasional belanja modal, belanja umum, dan belanja operasional.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim: 2007). Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985).

Dana Alokasi Umum

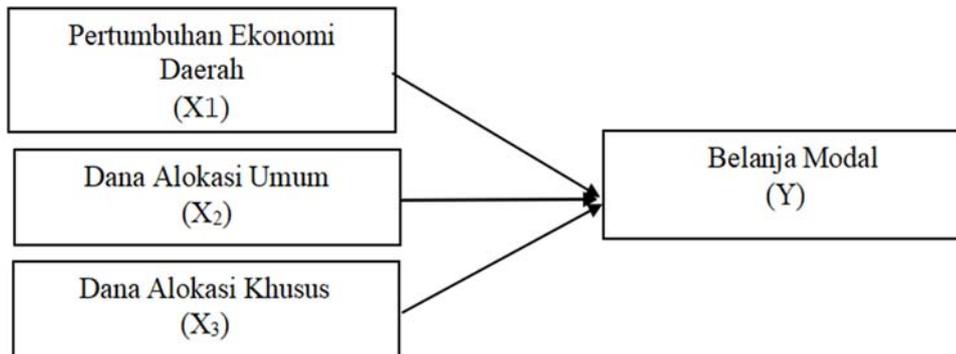
Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang

ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

HIPOTESIS



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan **Gambar 1**, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Pengaruh dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

3. Pengaruh dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan keuangan tahunan kementerian keuangan republik Indonesia yang terdaftar di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil data laporan realisasi APBD selama periode 2016- 2019. Data penelitian diunduh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah Kabupaten dan 6 daerah Kota sehingga total populasi adalah 35 data seluruh Kab dan Kota provinsi Jawa Tengah yang terdaftar di Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah

www.djpk.depkeu.go.id. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh.

Definisi Operasional dan Pengukurannya

1. Pertumbuhan Ekonomi (XI)

Pertumbuhan ekonomi, adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu menggunakan PDRB yang merupakan perbandingan total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tertentu. Dirumuskan sebagai berikut

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat ditentukan dengan perhitungan:

DAU Kabupaten/Kota = 90% x 25% X Pendapatan Dalam Negeri x Bobot DAU

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Hasil dari statistik deskriptif mempunyai tujuan supaya dapat memberikan gambaran mengenai data penelitian yang dilakukan dengan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki tujuan supaya dapat mengetahui apakah model regresi dalam suatu penelitian baik atau tidak. Uji asumsi klasik yang diterapkan adalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas.

3. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data penelitian ini adalah koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang disajikan adalah *mean*, *maximum*, *minimum* dan standar deviasi. Pengolahan data dalam analisis deskriptif ini memanfaatkan program IBM SPSS *Statistic* 19. Hasil data dari setiap variabel digambarkan dalam

tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PE	140	2.33	23.54	5.5431	1.69438
DAU	140	2.61E+11	1.44E+12	8.6708E+11	2.89213E+11
DAK	140	22708648000	5.19E+11	2.4619E+11	1.35168E+11
BM	140	9588038222	1.28E+12	3.0642E+11	2.24909E+11
<i>Valid N (listwise)</i>	140				

(Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

a. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel pertumbuhan ekonomi didapatkan nilai minimum sebesar 2,33% pada tahun 2019 dan nilai maksimum Pertumbuhan Ekonomi sebesar 23,54% yakni pada tahun 2016 Sedangkan, nilai *mean* Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,54%

b. Dana Alokasi Umum (X_2)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Dana Alokasi Umum didapatkan nilai minimum sebesar Rp. 261.280.572.000,00 dan nilai maksimum Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.442.330.354.000,00 Sedangkan, nilai *mean* Dana Alokasi Umum sebesar Rp 867.081.472.7778.716,00

c. Dana Alokasi Khusus (X_3)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Dana Alokasi Khusus didapatkan nilai minimum sebesar Rp 22.708.648.000,00 dan nilai maksimum Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 518.848.499.000,00, nilai *mean* Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 246.188.431.188.871

d. Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Belanja Modal didapatkan minimum senilai Rp 9.588.038.222,00 dan nilai maksimum Belanja Modal sebesar Rp 1.275.359.088.966,00 yakni pada tahun 2017 Sedangkan, nilai *mean* Belanja Modal sebesar Rp 30.642.271.9637,0714

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji ini mempunyai tujuan supaya mengetahui kelayakan atas model regresi pada suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Nilai Tolerance: 0,997; 0,261; 0,262 > 0,10 Nilai VIP: 1,003; 3,826; 3,823 < 10	Tidak ada
Uji autokorelasi	Nilai p-value: 0,71 > 0,05	Tidak ada
Uji heteroskedastisitas	Nilai p-value: 1,000; 0,242; 0,364 > 0,05	Tidak ada
Uji normalitas	Nilai p- Value: 0,51 > 0,05	Residual normal

(Sumber: Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian dilaksanakan dengan menerapkan model analisis regresi linear berganda, yakni menggunakan uji statistik F, dan uji statistik t dan uji koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Statistik F

Uji ini mempunyai tujuan supaya mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji dengan memanfaatkan program SPSS 19 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.756E+24	3	1.252E+24	51.999	.000 ^b
	Residual	3.275E+24	136	2.408E+22		
	Total	7.031E+24	139			

a. *Dependent Variable: BELANJA MODAL*

b. *Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DAU, DAK*

(Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

Berdasarkan Tabel 3, hasil F hitung memiliki nilai 51,999 dengan signifikansinya 0,000 jadi H_0 ditolak dan H_a diterima. Tingkat signifikansi < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal. Pengaruh secara simultan dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat menjadikan model regresi penelitian dikriteriakan cocok atau *fit*.

b. Uji Statistik T

Uji ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil uji dengan memanfaatkan program SPSS 19 disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4. Uji T

Model	<i>Coefficients^a</i>			t	Sig.
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.314E+11	646249854		-3.581	.000
PERTUMBUHAN EKONOMI	1168843734	778059858	.092	.150	.881
DAU	.737	.092	.948	8.052	.000
DAK	-.438	.196	-.263	-2.237	.027

a. *Dependent Variable: BELANJA MODAL*

(Sumber : Data sekunder yang telah diolah tahun 2020)

Berdasarkan **Tabel 4**, didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = -231421827781.892 + 1168843733.665 X_1 + 0,737 X_2 - 0,438 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai konstanta sebesar -231421827781.892 Artinya apabila Pertumbuhan ekonomi, Dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus adalah nol maka Belanja Modal adalah sebesar -231421827781.892 Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal, hal ini dapat diketahui dari signifikansi variabel sebesar 0,881 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,092. Variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja modal, hal ini dapat diketahui dari signifikansi variabel sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal, hal ini dapat diketahui dari signifikansi variabel sebesar 0.027 yang lebih rendah dari 0,05.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Adapun hasil uji koefisien determinasi pada tabel berikut

Tabel 5. Koefisien Determinasi (R^2)**KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)**

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.731 ^a	.534	.524	1.55176E+11

a. *Predictors: (Constant), PERTUMBUHAN EKONOMI, DAU, DAK*

b. *Dependent Variable: BELANJA MODAL*

(Sumber : Data sekunder 2020)

Hasil dari pengujian koefisien determinasi memperlihatkan *Adjusted R Square* senilai 0.524. Hal ini berarti sebesar 52,4% variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, DAU, dan DAK. Sisa dari 47,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal

Berdasar hasil uji statistik t, variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini dapat penulis jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pertumbuhan Ekonomi maka Belanja Modal akan semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Syukri & Hinaya (2019) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pada dasarnya Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Sebagian besar Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan membaiknya ekonomi global dan domestik.

2. Pengaruh DAU terhadap belanja modal.

Berdasarkan uji statistik t, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tengah, dimana ketika DAU meningkat maka diiringi dengan peningkatan Belanja Modal mengingat DAU merupakan sumber pembiayaan Pemda yang berasal dari APBN guna mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Dengan adanya DAU diharapkan Pemda yang mempunyai potensi PAD kecil dapat tetap membiayai kebutuhannya dan juga tetap dapat melakukan peningkatan pelayanan publik melalui Belanja Modal.

3. Pengaruh DAK terhadap belanja modal

Berdasar hasil uji statistik t, variabel DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantumendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian di atas yaitu semakin besar Dana Alokasi Khusus maka dapat menyebabkan semakin besar pula kegiatan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di provinsi Jawa Tengah. DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal di provinsi Jawa Tengah. DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bhuono Agung. (2005). Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X.
- David Harianto & Priyo Hari Adi (2006). "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah". Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Hadi, S. (2004). Analisis Regresi. Andi Offset: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul, Kusufi Syam. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, D. & Adi, P.H. (2007). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per-Kapita. SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007.
- Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Irsyadi, M.A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kawedar, Warsito.dkk.(2008). Akuntansi Sektor Publik. Semarang: UNDIP
- Kuncoro Mudrajat. (2004). Otonomi dan Pembangunan daerah: Reformasi Perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
- Richard, A. & Tommasi, D. (2001). Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries. Paris: OECD
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syarifin Pipin, Jubaedah Dedah. (2005). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Wandira, A.G. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)”.Sekripsi.Universitas Negeri Semarang